

MENGGKRITISI ARUS GLOBALISASI

Oleh:

Simon Untara • Herlina Yoka Roida • Valentinus Saeng
• Wisnu Kristiadi • Finsensius Yuli Purnama
• Agustinus Pratisto Trinarso • Ahmad Zainul Hamdi
• Elisabeth Supriharyanti • Robertus Wijarnarko
• Adrianus Akik Purwanto • Datu Hendrawan • Agustinus
Ryadi • Ramon Nadres • Anastasia Jessica Adinda S.

Editor:

Anastasia Jessica Adinda S • Simon Untara



PENERBIT PT KANISIUS



**Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya**



Kata Pengantar

Globalisasi bukanlah hal yang asing bagi manusia yang hidup pada abad ke-21 ini. Globalisasi hadir dalam ideologi, ekonomi, agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, juga dalam ranah hidup sehari-hari, seperti gaya berpakaian, kebiasaan makan, konsumsi media dan hobi. Kurang lebih selama setahun ini (2015-2016), kami, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), melakukan refleksi kritis terkait arus-arus Globalisasi. Hasil dari refleksi kritis tersebut kami manifestasikan, salah satunya, dalam buku berjudul ‘Mengkritisi Arus Globalisasi’ ini. ‘Mengkritisi’ berarti memahami batas-batas pemahaman. Dalam gagasan ‘mengkritisi’ ini terkandung upaya tanpa kenal lelah untuk mencari pemahaman yang paling tepat dan komprehensif tentang suatu gagasan tertentu. Disamping itu, ‘mengkritisi’ juga dimaknai sebagai pembentukan kesadaran akan batas-batas pemikiran termasuk berbagai efek yang mungkin muncul dari suatu pemahaman. ‘Mengkritisi Arus Globalisasi’ berarti berusaha terus-menerus untuk mencari pemahaman yang tepat dan komprehensif tentang globalisasi dan arus-arus kepentingan yang menyertainya. Dengan analisa kritis ini, kami berharap mampu membangun kesadaran kritis dan tidak hanya *ikut-ikutan* saja di tengah arus kepentingan global.

Globalisasi di satu sisi menantang berbagai institusi dan individu untuk berkarya dengan kualitas sebaik mungkin sehingga bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang di dunia ini. Namun, di sisi lain,

globalisasi tidak bisa begitu saja disimpulkan sebagai proses yang tanpa persoalan. Globalisasi menjadi persoalan terlebih bila melulu dipahami sebagai Liberalisasi, Pembaratan (*Westernisasi*) dan juga Internasionalisasi. Ketika menyamakan pengertian Globalisasi dengan Liberalisasi yang bersekutu dengan Neo-Kapitalisme, misalnya, Globalisasi dapat dilihat sebagai inisiator yang melahirkan dikotomi menang-kalah. ‘Yang menang’ berkuasa dan ‘yang kalah’ disingkirkan. Inilah kondisi ketidakadilan yang akhirnya membawa kepada persoalan-persoalan sosial lain seperti konsumerisme, hedonisme, radikalisme, dan fundamentalisme.

Buku berjudul ‘Mengkritisi Arus Globalisasi ini’ merupakan kumpulan makalah yang ditulis oleh para pemateri *Extension Course* 2015. *Extension Course* merupakan kelas filsafat reguler untuk masyarakat umum yang dikelola oleh Fakultas Filsafat UKWMS. Buku ‘Mengkritisi Arus Globalisasi’ ini menghadirkan berbagai diskursus perihal Globalisasi yang diharapkan dapat memberi pencerahan bagi para pembaca dalam merespon Globalisasi.

Buku ini ditujukan bagi seluruh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap Globalisasi dan arus-arus kepentingan di dalamnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada PT. Kanisius yang telah bersedia bekerja sama untuk menerbitkan buku ini, Para Pembicara dan Para Peserta *Extension Course* 2015 atas diskusi-diskusi yang berharga, serta seluruh pihak yang telah membantu jalannya penyelenggaraan *Extension Course* 2015 hingga terbitnya buku ini.

Surabaya, 16 Mei 2016

Koordinator *Extension Course* 2015



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Prolog <i>Extension Course 2015</i> “Mengkritisi Arus Globalisasi” Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	1
<i>Simon Untara</i>	
Membaca Kemungkinan Mengatasi Globalisasi: Belajar dari Sejarah	25
<i>Simon Untara</i>	
Globalisasi dan Neoliberalisme: Menuju Neosentralisme?.....	47
<i>Herlina Yoka Roida</i>	
Sejarah Singkat Perkembangan dan Karakteristik Kapitalisme	55
<i>Valentinus Saeng</i>	
Globalisasi Ekonomi: Proses Pemiskinan Buruh	85
<i>Wisnu Kristiadi</i>	

Globalisasi dan Masyarakat <i>Cybernetic</i> dalam Perspektif (Ilmu) Komunikasi.....	99
<i>Finsensius Yuli Purnama</i>	
Negara dalam Globalisasi.....	119
<i>Agustinus Pratisto Trinarso</i>	
Globalisasi dan Fundamentalisme Agama: Agama di Tengah Jaring-jaring Dunia Modern	141
<i>Ahmad Zainul Hamdi</i>	
Globalisasi dan Konsumerisme	163
<i>Elisabeth Supriharyanti</i>	
Menimbang Kosmopolitanisme (Globalisasi-Lokalitas)	185
<i>Robertus Wijanarko</i>	
Globalisasi dan Dunia Pendidikan di Indonesia	203
<i>Adrianus Akik Purwanto</i>	
Melampaui Antroposentrisme dan Rasio Instrumental.....	225
<i>Datu Hendrawan</i>	
Globalisasi dan Prinsip Universal dalam Moralitas	249
<i>Agustinus Ryadi</i>	
Globalisasi <i>Bitter-Sweet Fruits On The Road To Globalism</i>	275
<i>Ramon Nadres</i>	
Epilog <i>Extension Course</i> ‘Mengkritisi Arus Globalisasi’: ‘Berenang’ dalam Arus Globalisasi	307
<i>Anastasia Jessica Adinda S.</i>	
Biodata Penulis.....	341



Globalisasi dan Prinsip Universal dalam Moralitas²⁴⁹

Agustinus Ryadi

Pendahuluan

Filsuf-filsuf zaman modern begitu kuat memikirkan soal universalisme. Kita mengingat revolusi Amerika, *Bill of Rights* (1776) dan *Declaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen* dari Revolusi Prancis (1789) adalah suatu manifestasi dari zaman pencerahan. Inti yang ditegaskan adalah semua manusia memiliki hak yang sama. Konsep martabat manusia dirumuskan sebagai paham dasar HAM yang memiliki validitas universal. Artinya, HAM berlaku kapan, di mana saja dan bagi setiap individu tanpa pengecualian. Sebagai contoh lain, keberlakuan universalitas merupakan ciri khas kesadaran moral menurut Immanuel Kant (1724-1804). Manusia memiliki kepentingan moral. Kant meyakini bahwa moralitas dapat dirumuskan dengan imperatif kategoris.

²⁴⁹ Makalah ini merupakan saduran salah satu bab buku Aldo Vendemiati, *Universalismo e Relativismo nell'Etica Contemporanea*, Marietti, Genova-Milano, 2007 dan pengembangan dari referensi yang terkait, terutama bagian 3. Bagaimana etika global diwujudkannyatakan?

The Universal Declaration of Human Rights (1948) merupakan tonggak penerapan HAM secara global yang dilaksanakan oleh PBB. Semenjak deklarasi tersebut, isu HAM menjadi universal²⁵⁰ dengan beberapa catatan yang tidak dapat diabaikan. Nilai-nilai HAM menghadapi beberapa masalah besar terkait dengan universalitas karena perbedaan konsepsi dan interpretasi²⁵¹. Martabat manusia dan hak-hak manusia yang setara diakui sebagai titik pijak kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Pelecehan atas prinsip etis ini akan menghantar umat manusia menuju kekelaman peradaban barbarian.

Sikap manusia yang satu terhadap yang lain bermacam-macam: ada yang indiferentis, diskriminatif, partikularistis, superioristis, dan ada yang universalistis. Sikap orang yang universalistis memandang semua manusia memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Dari sinilah lahir paham universalisme. Universalisme berasal dari kata bahasa Latin *universum* yang berarti alam semesta dunia. Menurut paham universal kemanusiaan itu umum, sama di seluruh dunia.

Oleh karena itu, prinsip universal dalam moralitas harus memiliki sifat mendunia dan tidak regional²⁵². Prinsip universal berarti apa yang dianggap benar oleh seorang individu harus juga benar bagi individu lain dalam situasi yang sama. Meskipun manusia berbeda dari segi warna kulit, tingkat budaya, agama yang dianut, keadaan ekonomi, status sosial, manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Universalitas kesadaran moral adalah kesadaran bahwa seharusnya setiap orang dalam situasi saya sependapat dengan saya.

²⁵⁰ Hak-Hak azasi manusia memiliki implikasi yang sangat luas. Hal ini tampak dalam lima karakter dasarnya sebagaimana dirumuskan oleh Robert Alexy, *Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1994. *Pertama*, universalitas hak-hak asasi manusia berhubungan dengan pemilik hak dan penanggung jawab. *Kedua*, moralitas yang tampak dalam legitimasi rasional berhadapan dengan setiap model argumentasi. *Ketiga*, aspek fundamental, yang berarti hak asasi manusia merupakan harga mati bagi manusia seperti hak untuk hidup. *Keempat*, hak-hak asasi manusia memiliki prioritas di hadapan hukum positif. *Kelima*, hak-hak asasi manusia bersifat abstrak dalam hubungan dengan tanggung gugat, bentuk validitas dan batas-batasnya.

²⁵¹ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, CAPS, Yogyakarta, 2014, hlm. 230.

²⁵² Bdk. Michael Walzer (Profesor Emeritus Sekolah Ilmu Sosial, Harvard University), penganut universalisme relatif, berpandangan bahwa prinsip-prinsip universal yang masih memiliki konstelasi persoalan yang mirip dalam komunitas-komunitas bangsa berbeda.

Penulis akan mempersoalkan apakah prinsip universal dapat diberlakukan pada semua budaya yang berbeda-beda dalam globalisasi ini? Oleh karena itu, penulis akan membahas menyoal globalisasi (1) pencarian etika global (2), dan bagaimana etika global diwujudkan (3), serta refleksi (4).

1. Menyoal Globalisasi

Ada macam-macam reaksi di hadapan situasi dunia baru (arus globalisasi) yang mencuat sejak tahun 1989²⁵³. “Akhir dari sejarah” dan kedatangan budaya universal (1.1.), perjuangan budaya (1.2.). Perlu dipertanyakan seberapa sama kedua pandangan tersebut.

1.1. Budaya Universal?

Penulis memulai dari runtuhnya komunisme dan dimulainya damai universal: akhir dari perang dingin yang ditandai dengan akhir konflik besar internasional dan lahirnya dunia yang relatif harmonis. Marxisme-Leninisme, sumber inspirasi yang begitu kuat, ternyata gagal di abad ke-20²⁵⁴. Namun optimisme baru muncul, dan kita mendengar tesis Francis Fukuyama yang memaklumkan rasa syukur bahwa kita telah tiba di akhir sejarah: ekonomi pasar ternyata tak bisa dikalahkan, demokrasi liberal ternyata menang di mana-mana.

Namun bukankah hal tersebut di atas merupakan ketakaburan? Di “akhir sejarah”, manusia menghadapi persoalan ketika kelak dua

²⁵³ Runtuhnya Uni Soviet memiliki dua arti. Arti pertama, keruntuhan sebuah sistem pemerintahan dan terkuburnya sebuah ideologi besar. Arti kedua, berakhirnya sebuah perdebatan panjang dan pergulatan gagasan untuk mencari bentuk masyarakat yang ideal dan sistem ekonomi yang paling mampu menyegerakan kesejahteraan rakyat. Lih. Rizal Mallarangeng, “Kata Pengantar: Dari Kapitalisme ke Globalisasi” dalam Martin Wolf, *Globalisasi: Jalan menuju Kesejahteraan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007: x.

²⁵⁴ Saat “ethis” adalah saat ketika manusia mengusahakan hidupnya hubungan tanpa antagonisme, tanpa kuasa menguasai. Ketika Marx membayangkan masyarakat komunis, yang diharapkan adalah sebuah hubungan antarmanusia tanpa perang kelas, di mana Negara – yang diartikannya sebagai instrumen pemaksaan – praktis tidak diperlukan lagi. Dengan perkataan lain, saat “ethis” dalam politik adalah saat yang memperjuangkan hidup yang egaliter. Dalam bentuknya yang radikal, itulah saat yang merindukan anarki: *an* (tanpa) dan *archos* (penguasa).

miliar lebih manusia di Cina dan India memasuki ekonomi pasar seperti digagas oleh Fukuyama – dengan dinamika yang dilecut oleh hasrat berjuta-juta orang untuk makan, bermobil, bepergian sepuas-puasnya. Siakah alam untuk itu?

Dalam satu hal Fukuyama benar. Perdebatan dan kompetisi gagasan yang ada antara kapitalisme dan sosialisme memang masih terus hidup, namun intensitas dan daya tariknya telah jauh menurun. Dalam hal lain Fukuyama salah. Perdebatan-perdebatan penting yang menggairahkan dalam mencari bentuk masyarakat yang ideal dan sistem kemasyarakatan yang sanggup mengangkat harkat hidup rakyat banyak terus berlangsung. Demikian pula perdebatan mengenai gagasan-gagasan besar sosial, politik, agama, dan kebudayaan terus terjadi. Kita saksikan bagaimana tema-tema kebudayaan di seputar Islam dan Barat berkembang dan menjadi salah satu bahan perdebatan intelektual yang sangat intens pada awal abad ke-21.

Yang perlu ditanyakan adalah seberapa efektif nilai-nilai, kepercayaan, peraturan-peraturan, penggunaan dan lembaga-lembaga (1.1.1.), lalu Aldo Vendemiati menilai prospek prinsip universalitas dan pluralitas budaya (1.1.2.).

1.1.1. Peradaban yang Mana?

Samuel P. Huntington menamai “Budaya Davos” karena Davos adalah lokasi pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia, di mana banyak pertimbangan, pilar-pilar budaya universal yang terkait dengan ide-ide, nilai-nilai dan doktrin Barat. Banyak negara mengirim wakil-wakilnya untuk mengikuti pertemuan di Davos yang terbagi atas para idealis dari individualisme, ekonomi pasar, dan politik demokrasi. Pertemuan tersebut mengontrol semua organisasi internasional, banyak pemerintah nasional dan negara-negara yang berpotensi besar-besaran dalam ekonomi dan militer:

“Oleh sebab itu, Budaya di Davos memiliki kepentingan yang luar biasa. Di tingkat dunia, seberapa banyak orang yang ikut ambil bagian? Dari luar Barat, dicatat kemungkinan kurang dari 50 juta, atau 1% dari

*jumlah penduduk dunia, atau bahkan mungkin sepersepuluh dari 1% jumlah penduduk dunia*²⁵⁵.

Hal di atas bukan pembicaraan soal budaya universal melainkan suatu budaya yang hanya berada di tingkat elit. Dengan perkataan lain, budaya yang berada di tingkat elit berlawanan dengan budaya pada tingkat yang sama namun tidak global dalam dunia Barat.

Sebaliknya, kewarganegaraan universal yang telah diperbaiki pada zaman ini seharusnya dinyatakan dari fenomena massa yang tersebar di seluruh dunia, yang terkait erat dengan budaya konsumerime dan “budaya” populer. Kejayaan budaya Barat yang dimaksud seperti McDonald dan Coca-Cola, musik populer dan fim-film di Hollywood²⁵⁶.

Tak seorang pun lari dari aspek kontemporer yang dipenuhi dengan alat-alat komunikasi global: film yang banyak ditonton di seluruh dunia pada tahun 1993, 88% adalah buatan Amerika. Sementara dua organisasi dari Eropa dan dua organisasi dari Amerika mendominasi hasil dan penyebaran berita dunia. Siapa saja yang berkontribusi dapat menghasilkan persamaan nilai-nilai dan perilaku di seluruh dunia. Sementara warga negara yang kuat budaya nilainya dan religiositasnya mengakar (seperti dunia Islam) didominasi oleh Barat melalui alat-alat komunikasi bertaraf dunia membentuk sumber ketersinggungan dan permusuhan. Oleh karena itu:

*“tesis sekarang ini tidak digunakan lagi karena penyebaran budaya pop dan konsumerisme di tingkat dunia merupakan perwakilan dari kejayaan kewarganegaraan Barat yang merendahkan budaya Barat. Hakikat kewarganegaraan Barat dan Magna Carta bukanlah “Big Mac” (salah satu jenis menu di McDonald). Kenyataannya, bahwa hal-hal yang bukan Barat dapat membinasakan McDonald yang tidak memiliki hal-hal terkait dengan penerimaan mereka terhadap penyebaran budaya pop*²⁵⁷.

²⁵⁵ S.P. Huntington, *Lo scontro della civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Garzanti, Milano, 1997 (Orig. Inggris 1996), hlm. 71: “La cultura di Davos ha, quindi, un’importanza straordinaria. A livello mondiale, tuttavia, quante sono le persone che la condividono? Al di fuori dell’Occidente, si tratta probabilmente di meno di 50 milioni, ossia l’1 per cento della popolazione mondiale, o forse addirittura un decimo dell’1 per cento della popolazione mondiale”.

²⁵⁶ Bdk. G. Ritzer, *The McDonaldization of Society*, Pine Forge Press, Thousand Oaks, California, 2008

²⁵⁷ S.P. Huntington, *Lo scontro della civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Garzanti, Milano, 1997 (Orig. Inggris 1996), hlm. 72: “la tesi oggi in voga secondo cui la diffusione a livello mondiale della cultura pop e dei beni di consumo rappresenta il trionfo della civiltà occidentale svilisce la cultura occidentale. L’essenza della civiltà occidentale e la Magna

Kita perlu mempertanyakan nilai-nilai semacam apa yang masih tinggal dalam budaya Barat itu sendiri. Joseph Ratzinger seringkali menyatakan bahwa Barat tampaknya tidak mencintai ke-Barat-annya sendiri. Barat selalu tampak sebagai kemunduran peradaban, susah dengan masalah dan keperluan intern: pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran, kerugian publik yang hebat, disintegrasi sosial, dan krisis keluarga. Kesadaran mendasar yang timbul adalah sulitnya memikirkan Barat sejauh dapat mengkonstruksi “peradaban universal” *tout-court*.

Di lain pihak, konsep peradaban universal masih problematik. Apa saja yang membentuk ‘peradaban’?

1.1.2. Tunggal dan Jamak

Istilah “budaya” berasal dari kata Latin *civilitas*, yang digunakan oleh Quintiliano untuk menunjukkan seni memerintah, politik. Svetonio menggunakan istilah tertentu layaknya sinonim dari kelembutan hati yang ramah. Namun, secara harafiah, “*civilitas*” berarti kondisi dari warga negara, penduduk, sedangkan di satu pihak kata sifat “*civilis*” memiliki arti politik, publik, di lain pihak berarti seseorang yang mulia, bersahabat, sopan santun, baik hati.

Orang-orang Prancis biasa melawankan kata “*civilta*” dengan “*barbar*” pada abad XVIII²⁵⁸. *Barbar* berarti kondisi orang asing. *Barbarus* adalah orang-orang yang berbicara dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti, namun arti kunonya kasar, biadab, bengis, keras hati. Tampak dosa asal beraneka kelompok insan dalam penggunaan kata semantik tersebut secara implisit: mereka menyadari diri mereka sendiri sebagai warga negara dan yang lain menyadari diri mereka sendiri sebagai barbar. Namun yang penting ditegaskan adalah segenap warga negara yang lain berpusat pada etnis secara alamiah, hanya warga negara Barat meletakkan persoalan pada etnosentrisme²⁵⁹.

Carta, non il ‘Big Mac’. Il fatto che i non occidentali possano divorare il secondo non ha alcuna attinenza con la loro accettazione della prima”.

²⁵⁸ Bdk. Alois A. Nugroho, “Pemikiran Etika yang ‘Jatuh Bangun’ dalam KOMPAS, *Indonesia Abad XXI: Di Tengah Kepungan Perubahan Global*, Penerbit Harian KOMPAS, 2000: 485-494. Ia mencatat bahwa etika global ini akan melengkapi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Revolusi Prancis, *fraternite* atau *brotherhood*. Perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan akan membuat alam sebagai “kapal” yang sama-sama manusia tumpang akan karam dan alam sebagai “rumah” yang kita huni bersama akan roboh.

²⁵⁹ Aldo Vendemiati, *Op. Cit.*, hlm. 62.

Pemikir-pemikir Jerman membedakan antara “kewarganegaraan” dan “kebudayaan” pada abad XIX. Kewarganegaraan adalah *civitas*, kehidupan urban yang diatur secara politik, mengandung mekanik, teknologi, dan faktor-faktor material lain. Kebudayaan adalah *cultura*; sebuah masyarakat yang mengandung nilai-nilai ideal dan religius, kualitas moral dan artistik. Pembedaan tidak harus untuk memisahkan, melainkan untuk menyatukan: kebudayaan cenderung menghasilkan sebuah kewarganegaraan dan kewarganegaraan kadang-kadang menghasilkan kebudayaan.

Kedua istilah tersebut di atas memiliki ide positif untuk promosi kemanusiaan: istilah “tak beradab” terdiri dari kata *silva* (“hutan”, tempat yang belum dikembangkan) dan *colto* (=dibudidayakan), dari “barbar” ke “kewarganegaraan”. Istilah “barbar” dan “tak beradab” menentang kebudayaan dan kewarganegaraan yang berbeda antarmereka, tetapi yang membuat perbedaan terbesar adalah antara tak kewarganegaraan dan kewarganegaraan.

Pembedaan antara kewarganegaraan dan kebudayaan sangat berguna di hadapan beberapa interpretasi yang memahami bahwa modernisasi dapat menemukan faktor-faktor yang menentukan timbulnya kewarganegaraan universal. Modernisasi membuat manusia diawasi dan membentuk lingkungan yang sesuai dengan cara-cara yang seluruhnya baru. Menurut beberapa pakar Barat, kewarganegaraan yang dimodernkan, adalah kepala dari proses yang menerima sebuah budaya modern; melaluinya masyarakat lain menerima cara-cara yang sama dalam hal pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan struktur sosial, budaya modern dan Barat menjadi tujuan untuk menjadi budaya universal di planet²⁶⁰.

Modernisasi dunia berlaku sama pada kenyataannya yakni sebuah homogenisasi budaya dan homogenisasi mereka berasal dari kewarganegaraan Barat? Kita barangkali mempersiapkan suatu “kejayaan kewarganegaraan tunggal” yang ditandai dengan “akhir kejamakan budaya” dalam budaya besar yang berada di planet ini? Jika demikian, kita dapat memahami bahwa marxisme menjadi satu-satunya

²⁶⁰ S.P. Huntington, *Lo scontro della civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Garzanti, Milano, 1997 (Orig. Inggris 1996), hlm. 88 dst.

penggerak dalam sejarah ekonomi dan bahwa kebudayaan lain bukan suprastruktur: seperti cara produksi tradisional terkait dengan budaya tradisional yang berbeda, cara produksi industri (yang sama) sesuai dengan kewarganegaraan industri yang dibenarkan. Kewarganegaraan ini akan memiliki karakter demokrasi dari nilai-nilai Barat, pasar bebas, hak-hak Negara, individualisme dan hak-hak manusia. Sebaliknya, Huntington menyatakan:

“Perluasan wilayah Barat mendorong modernisasi dan pembaratan masyarakat yang bukan Barat. Politisi papan atas dan para intelektual masyarakat tersebut menanggapi pengaruh Barat dalam tiga cara: kedua belah pihak menolak; kedua belah pihak menerima; pihak pertama menerima dan pihak kedua menolak”²⁶¹.

Penolakan total terhadap pengaruh Barat merupakan usaha untuk mengasingkan suatu masyarakat dari dunia modern yang selalu dikaitkan dengan “Baratisasi”. Di lain pihak, ia merusak suatu budaya kuno untuk menggantinya dengan budaya baru yang didatangkan dari kewarganegaraan lain. Cara yang ketiga adalah ia berusaha menyatukan modernisasi dan memelihara nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan melembagakan budaya khas.

Mike Featherstone²⁶² melihat budaya global sebagai proses kekeluargaan terhadap pelbagai kultural yang lebih luas dan kaya. Proses kekeluargaan budaya ini tidak pernah terwujud karena para pemain utama ekonomi global (IMF dan Bank Dunia) tidak mampu atau tidak mau memahami kompleksitas relasi-relasi budaya tersebut. Mereka memaksakan model budaya ekonomi yang seragam di pelbagai tempat yang berbeda dan di dalam waktu yang berbeda. Kedua lembaga tampak memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan Barat, yakni melindungi nilai-nilai universal atas nama dunia yang dibentuk dalam citra dirinya sendiri²⁶³.

²⁶¹ S.P. Huntington, *Lo scontro della civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Garzanti, Milano, 1997 (Orig. Inggris 1996), hlm. 95: “L’espansione dell’Occidente ha stimolato la modernizzazione e l’occidentalizzazione delle società non occidentali. Le élite politiche e intellettuali di quelle società hanno risposto all’influenza occidentale fondamentalmente in tre modi: rifiutando entrambe; abbracciando entrambe; abbracciando la prima e rifiutando la seconda”.

²⁶² Mike Featherstone (Ed.), *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*, Sage Publications India pvt Ltd, New Delhi, 1991.

²⁶³ Tracey Skelton, “Globalization, Culture, and Land: Carribean”, dalam Eleonore Kofman & Gillian Youngs, *Globalization: Theory and Practise*, hlm. 322.

Akhir sejarah yang telah digambarkan oleh Fukuyama menggambarkan juga akhir dari keragaman budaya (plural). Kondisi ini merupakan kondisi penyeragaman budaya. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir telah membantu proses penyeragaman. Negara yang mengalami modernisasi ekonomi niscaya semakin mirip secara kultural. Masyarakat tersebut menjadi semakin disatukan melalui pasar global dan berkembangnya budaya konsumen global di dalamnya²⁶⁴. Fukuyama melihat penyeragaman budaya sebagai sebuah keniscayaan sejarah perkembangan budaya.

1.2. Konflik Kewarganegaraan/Peradaban?

Perkembangan posmodernisme telah menciptakan pelbagai kondisi baru kebudayaan. Sebenarnya kondisi baru kebudayaan merupakan konsekuensi dari penerapan pelbagai teknologi mutakhir dalam dominasi dan hegemoni sistem kapitalisme global dewasa ini²⁶⁵. Catatan tesis Huntington “konflik peradaban” selalu berjalan ke arah semakin radikal. Peristiwa yang menyedihkan adalah “konflik peradaban” cenderung menentang segala hal dari kelompok lain dan menginterpretasikan secara antagonis dalam rangka mengakui identitasnya sendiri: “Membenci adalah manusiawi – menurut Huntington. – Manusia membutuhkan musuh sebagai motivasi untuk dapat mendefinisikan dan menemukan kesempatan”²⁶⁶.

Prinsip konflik adalah oposisi Barat terhadap yang lain:

“Masalah mendasar adalah hubungan antara Barat dan kewarganegaraan lain dapat dirangkum dalam perlawanan terhadap usaha-usaha Barat yang ada dan Amerika pada khususnya untuk mempromosikan suatu budaya Barat universal sedangkan kapasitas yang selalu lebih kecil untuk mewujudkan tujuan tersebut. [...] Maka, bagi Barat hal ini merupakan universalisme, sedangkan bagi yang lain adalah imperialisme”²⁶⁷.

²⁶⁴ Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, Penguin Books, 1992, hlm. xv.

²⁶⁵ Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Jalasutra, Yogyakarta & Bandung, 2004, hlm. 433.

²⁶⁶ S.P. Huntington, *Lo scontro della civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Garzanti, Milano, 1997 (Orig. Inggris 1996), hlm. 184.

²⁶⁷ *Ibid*, hlm. 265 dst.: “Il problema fondamentale nei rapporti tra l’Occidente e le altre civiltà si può riassumere nella discrepanza esistente tra i tentativi dell’Occidente, e dell’America in particolare, di promuovere una cultura occidentale universale e la sua sempre minore

Sebuah contoh yang menentukan dari konflik ini adalah konferensi dunia dari PBB dengan tema hak-hak manusia, yang diadakan di Vienna pada tahun 1993.

“Dari satu sisi ada negara-negara Eropa dan Amerika Utara; di sisi lain ada blok kira-kira lima puluh negara bukan-Barat di mana 15 anggota aktif berada di pemerintahan negara Amerika Latin (Kuba), negara Buddha (Birma), empat negara penganut Konfusius dengan ideologi politik, sistem ekonomi, dan tingkat-tingkat perkembangan yang bervariasi (Singapura, Vietnam, Korea Utara, dan Cina) dan 9 negara Islam (Malaysia, Indonesia, Pakistan, Iran, Irak, Siria, Yaman, Sudan, dan Libia). Kepala blok Asia-Islam adalah Cina, Siria dan Iran. Di tengah-tengah antara dua kelompok negara tersebut adalah negara-negara Amerika Latin (kecuali Kuba). Negara-negara di samping Barat dan negara-negara Afrika dan Ortodok kadang-kadang mengatur, kadang-kadang cocok, tetapi lebih sering bertentangan dengan kedudukan Barat”²⁶⁸.

Cara tersebut di atas merupakan suatu kejenuhan untuk mencoba meletakkan hak-hak manusia (HAM) menjadi semacam dasar terakhir etika, menggantikan hukum ilahi atau hukum kodrat – membantu penolakan secara eksplisit HAM, dilihat sebagai ekspresi budaya dari imperialisme Barat yang mengancam identitas budaya dari rakyat. Contohnya adalah taliban yang menganggap dirinya sebagai “pengawal”/”pelindung” sebuah aliran religius dan budaya Islam²⁶⁹.

Kesimpulan Huntington seperti berikut: “Ada tiga kelemahan yang ada dalam dunia yang didesak oleh konflik etnis dan perjuangan antarperadaban, berlakunya iman dari Barat secara universal dalam budayanya sendiri, yakni: palsu, buruk, dan berbahaya”²⁷⁰.

capacita di realizzare questo obiettivo. [...] Quello che per l’Occidente e universalisme, per gli altri e imperialismo”.

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 285: “Da un lato c’erano i Paesi europei e nordamericani; dall’altro un blocco di circa cinquanta Stati non occidentali i cui quindici membri più attivi comprendevano i governi di un Paese latinoamericano (Cuba), uno buddista (Birmania), quattro Paesi confuciani con ideologie politiche, sistemi economici e livelli di sviluppo molto diversi tra loro (Singapore, Vietnam, Corea del Nord e Cina) e nove Paesi musulmani (Malaysia, Indonesia, Pakistan, Iran, Iraq, Siria, Yemen, Sudan e Libia). A capo di questo blocco asiatico-islamico c’erano Cina, Siria e Iran. A meta strada tra questi due raggruppamenti c’erano i Paesi latinoamericani (tranne Cuba), spesso schierati a fianco dell’Occidente, e i Paesi africani e ortodossi, talora favorevoli ma più spesso in contrasto con le posizioni occidentali”.

²⁶⁹ Bdk. T.M. Franck, “I diritti umani sono universali?”, dalam *Fondazione liberal*, 10 (2002): 91-97.

²⁷⁰ S.P. Huntington, *Lo scontro della civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Garzanti, Milano, 1997 (Orig. Inggris 1996), hlm. 462: “Nell’emergente mondo di conflittualità etnic e di scontri tra

Kelemahan yang dimaksud oleh Huntington sulit untuk dibuktikan: barangkali kelemahan yang dimaksudkan adalah banyak rakyat tidak bisa menerima prinsip universal dalam moralitas. Bahaya lebih mudah untuk dimengerti: putusan universalisme sebagai “akibat yang tak bisa ditolak” dari imperialisme adalah perang. Buruk? Buruk untuk siapa? Dasar-dasar kriteria buruk itu apa? Pada dasarnya keburukan memiliki kriteria intern dari budaya Barat? Selanjutnya, apakah dasar keburukan menjadi kriteria intern bagi kewarganegaraan lain.

Akhirnya, kita dapat mendiskusikan kemungkinan untuk menyadari bahwa budaya Barat *tout-court* adalah benar secara universal, tetapi kita tidak mungkin menolak bahwa ada nilai-nilai universal yang benar bagi segenap warganegara.

2. Pencarian Etika Global

Aldo Vendemiati melihat kembali apa yang telah dinyatakan oleh Hans Küng mengenai etika global: “*a globalization of the economy and technology has intensified all over the world, which is increasing by avoiding control by a global policy and which lacks the foundation of a global ethic*”²⁷¹. Kita tidak dapat menafsirkan fenomena budaya globalisasi dengan gambaran “pedesaan global” yang menyesatkan karena mereduksi pentingnya budaya-budaya lain. Kita menyadari bahwa kita berbeda agama, filsafat dan etika serta konflik etnis masih ada di daerah bumi. Globalisasi memiliki dua wajah, di satu pihak ia cenderung menyamakan, di lain pihak ia cenderung membedakan.

Tantangan budaya dewasa ini adalah polarisasi antara orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Demokrasi tidak dapat mengatasi tantangan budaya tersebut tanpa koalisi antara polarisasi yang saling terkait, yakni tidak ada kedamaian antarbudaya tanpa damai antaragama,

civilta, la fede occidentale nella validita universale della propria cultura ha tre difetti: e falsa; e immorale; e pericolosa”.

²⁷¹ Hans Küng, *A Global Ethics for Global Politics and Economics*, SCM Press, London, 1997, hlm. 208. Bdk. Tulisan-tulisan Soedjatmoko yang berjudul “Kekuasaan dan Moralitas dalam Transformasi Global” dalam Kathleen Newland & Kemala Candrakirana Soedjatmoko (Penyunting), *Menjelajah Cakrawala: Kumpulan Karya Visioner Soedjatmoko*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994: 32-47; dan “Humanitarianisme: Kerangka Etis bagi Solidaritas Global” dalam Kathleen Newland & Kemala Candrakirana Soedjatmoko (Penyunting), *Op. Cit.*, 250-268; John Naisbitt, *Global Paradox*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994: 158-193.

dan tidak ada kedamaian antaragama tanpa dialog antaragama. Maka kita memerlukan etika yang membumi yang mengandung unsur dialog dan kerjasama meski berbeda secara dogmatis.

“a global ethics is no substitute for the It is concerned simply with ‘a minimal basic consensus relating to binding values, irrevocable standards and moral attitudes which can be affirmed by all religions despite their dogmatic differences, and can also be supported by non-believers’”²⁷².

Konsensus etik tentu saja tidak bisa ada secara keseluruhan, karena kompleksitas dan pelbagai perbedaan di antara manusia. Situasi ini seyogyanya tidak membuat kita putus asa karena perbedaan itu semua, melainkan ia adalah perihal manusia. Manusia dapat dan harus berusaha menemukan sebuah konsensus etis minimal.

2.1. Minimalisme Moralitas

Konsep minimal moralitas merupakan “usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, - yakni, untuk melakukan apa yang paling baik menurut akal, seraya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena oleh tindakan itu”²⁷³.

2.1.1. Berhadapan dengan Liberalisme Neo-Kontra Aktualisme

Sikap dasar kaum liberal berpangkal pada sebuah postulat bahwa individu adalah yang paling mengerti mengenai kepentingannya sendiri dalam situasi normal. Keputusan-keputusan yang diambil secara bebas dan otonom oleh masing-masing individu akan berdampak jauh lebih positif karena keputusan tersebut mencerminkan kenyataan serta keragaman kepentingan yang ada. Kaum liberal selalu memiliki sikap skeptis terhadap pengambilan keputusan kolektif atau keputusan sebuah komite yang mengatasnamakan kepentingan umum.

²⁷² Hans Kung, *A Global Ethics for Global Politics and Economics*, SCM Press, London, 1997, hlm. 109: “a global ethics is no substitute for the It is concerned simply with ‘a minimal basic consensus relating to binding values, irrevocable standards and moral attitudes which can be affirmed by all religions despite their dogmatic differences, and can also be supported by non-believers’”.

²⁷³ James, Rachels, *Filsafat Moral*, Terj. A. Sudiarta, Kanisius Yogyakarta, 2004 (Orig. Inggris, 2003), hlm. 40.

Globalisasi berarti perluasan cakupan pasar ke tingkat yang melampaui batas-batas negara, kaum liberal pada umumnya mendukung proses ini. Tidak mengherankan apabila kaum liberal selalu membela pasar, sebuah lembaga sosial ekonomi di mana jutaan individu mengambil keputusan dalam proses pertukaran yang luas.

Kaum komunitarian mengkritisi liberalisme. Liberalisme membedakan secara tegas antara konsep keadilan dan pandangan mengenai hidup baik, legalitas, dan moralitas. Tugas negara adalah menciptakan dan menjamin sistem koordinat hak atas dasar faham HAM dengan tujuan mengkoordinasi ruang-ruang kebebasan individual secara maksimal berdasarkan prinsip hukum yang berlaku umum (I. Kant). Meskipun pertanyaan seputar hidup baik bukan menjadi kewenangan negara (ranah privat), namun konsep hidup baik itu tidak pernah boleh bertentangan dengan prinsip hukum. Dengan demikian hukum membatasi kebebasan pandangan tentang hidup baik.

2.1.2. Pohon Jati Eropa, Buah Pohon Ek, Hutan

Bagi Walzer, minimalitas moralitas yang ditulis oleh Rawls merupakan suatu bentuk abstrak prosedur etis yang berasal dari kebudayaan demokrasi Amerika Utara. Dari situ, ia mereduksi dan mengabstraksikan pernyataan kontra-aktualisasi Rawlsian.

“Namun – menurut Walzer – tiada seorang pun berpendapat bahwa maksimalisme merupakan sumber satu-satunya dari minimalitas moralitas. Ketika para demokrat sendiri membayangkan bahwa peraturan yang terkait dengan dialog diturunkan ke peraturan moralitas, dari semua tipe moralitas, mereka semua layaknya pohon jati Eropa yang diperjelas bahwa buah pohon ek adalah benih dan sumber dari bagian hutan”²⁷⁴.

Sebaliknya, buah pohon ek hanya benih dari pohon jati Eropa dan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan tumbuh di dalam hutan yang tidak dapat dikendalikan oleh buah pohon ek. Bagaimana memperlakukan keaneka ragaman tumbuh-tumbuhan? Apakah kita harus memotong semua pohon yang tidak berasal dari buah pohon ek, katakanlah di luar hukum? Pada kenyataannya, prospek teorisasi berasal dari beberapa

²⁷⁴ Michael Walzer, *Geografia della Morale: Democrazia, Tradizioni e Universalismo*, Dedalo, Bari, 1999, hlm. 25.

prosedur: penolakan terhadap setiap moralitas bahwa tidak ada atau tidak mau menghasilkan dari prosedur mereka sendiri.

Walzer menegaskan bahwa tidak ada “titik berangkat netral bagi budaya legal untuk dikembangkan karena banyak macam perbedaan dan kemungkinan”²⁷⁵. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan untuk membangun sebuah prosedur yang minim. Untuk mengakhiri minimalisme (hasil dari saling berhubungan khususnya dengan persuasi), maka diperlukan putusan *a posteriori*:

“mengandung prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berkembang di waktu dan tempat yang berbeda dan bahwa mereka berpendapat yang sama dan mengekspresikan dalam pelbagai bahasa dan merefleksikan sejarah dan visi tentang dunia yang berbeda. Mereka tidak memiliki hak untuk menyelidiki akal budi baik sebagai karunia Tuhan maupun guna memperkembangkannya. Cukup menurut pendapatnya, ‘menyokong efek rangkap dua dari prinsip-prinsip ini dan hukum-hukum’. Konteksnya relatif karena ditentukan oleh perspektif yang kontras; dilihat dari jauh, pada peristiwa krisis dan konflik, terhubung erat dengan kewajaran”²⁷⁶.

Dengan perkataan lain, “minimum bukanlah hakikat dari maksimum, melainkan hanya sebuah penggalan”²⁷⁷.

2.2. Etika Mendunia

Michael Walzer memberi ciri khas pada kebenaran dan keadilan; K ung berpendapat yang sama dengan Walzer dengan menambahkan perihal kemanusiaan dan memperbaiki tradisi religius atau kemanusiaan yang bersifat etis. Contoh yang diberikan oleh Hans K ung adalah “‘aturan emas kemanusiaan’ yang dapat ditemukan dalam Konfusius, Rabi Hillel, Yesus dari Nazaret, Islam, Buddhisme, Hinduisme; tetapi ia menegaskan bahwa tradisi besar kemanusiaan mengenal juga sejumlah besar yang lebih konkret”²⁷⁸.

Kung melanjutkan pendapatnya:

²⁷⁵ *Ibid*, hlm. 26.

²⁷⁶ *Ibid*, hlm. 29.

²⁷⁷ *Ibid*, hlm. 30.

²⁷⁸ Hans K ung, *A Global Ethics for Global Politics and Economics*, Oxford University Press, New York & Oxford, 1998, hlm. 229.

“norma-norma etika dasar yang berasal dari Yunani terkait erat dengan penyeragaman manusia yang telah dilaksanakan hanya dalam zaman gelap dan penentuan sehingga terjadi suatu kompleksitas yang dasar – alamiahnya mengancam – hukum-hukum universal yang benar untuk berperilaku dan kehidupan bersama manusia dan membawa konsekuensi pada kemanusiaan otentik dari manusia”²⁷⁹.

Norma-norma ini, menurut Kung, akan dilaksanakan berangkat dari kebutuhan vital banyak praktisi dan banyak dicoba serta bagian dari pengalaman kelaliman pada beribu-ribu tahun. Dekalog dari religius Ibrani yang dipakai juga oleh kristiani dan muslim merupakan sintesa dari “etika umum komunitas dari sekurang-kurangnya tiga agama kenabian”²⁸⁰.

“Rumusan tentang hak-hak manusia universal yang membutuhkan waktu ribuan tahun (kemenangan besar dari pencerahan modern) adalah rumusan kewajiban manusia universal. Dan kami seharusnya menyanyinya jika ketetapan terbaik dari hak-hak manusia tidak dapat mempengaruhi ketetapan terbaik tentang kewajiban manusia”²⁸¹.

Etika mendunia menunjuk pada “konsensus dasar sekitar nilai-nilai yang mengikat, kriteria-kriteria yang tetap dan perilaku pribadi yang menjadi dasar keberadaannya, tanpa masyarakat macam apa pun berlari awalnya atau bahaya jatuh ke dalam anarki atau sebuah diktator baru”²⁸².

Etika mendunia, menurut Küng, harus menghindari beberapa hal di bawah ini:

- “*Bukan pengulangan Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia*”²⁸³.
- “*Bukan deklarasi politik*”²⁸⁴.

²⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 145: “quelle norme etiche elementari, che risalgono molto al di la dei Greci, sono collegate non l’ominizzazione dell’uomo niente affatto solo nella notte dei tempi e costituiscono fino ad oggi il complesso fondamentale – naturalmente minacciato – delle regole universalmente valide del comportamento e della convivenza umana e, di conseguenza, della genuina umanità dell’umano”.

²⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 146.

²⁸¹ *Ibid.*, hlm. 148.

²⁸² *Ibid.*, hlm. 185 dst.

²⁸³ Hans Kung & Karl-Josef Kuschel, *Etik Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999 (Orig. Inggris), hlm. 68.

²⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 68-69.

- “*Bukan anjuran moral yang kasuistik*”²⁸⁵.
- “*Bukan traktat filosofis*”²⁸⁶.
- “*Bukan pernyataan keagamaan*”²⁸⁷.

Dua prinsip fundamental harus menjadi dasar dari kebutuhan mendesak akan etika, yakni: *pertama*, setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi dan *kedua*, perbuatlah kepada orang lain seperti yang kau mau orang lain berbuat kepadamu.

Etika global harus mengacu pada norma-norma yang tetap. Hans Küng memaksudkan etika global dengan “konsensus fundamental tentang nilai yang mengikat, standar yang tidak bisa diganggu gugat, dan sikap personal”²⁸⁸. Etik global merupakan usaha untuk menanggapi kenyataan dunia dewasa ini yang sedang menderita. Maka etik global mengacu pada empat komitmen²⁸⁹, yakni, 1) Komitmen pada budaya non-kekerasan dan hormat pada kehidupan, 2) Komitmen pada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil, 3) Komitmen pada budaya toleransi dan hidup yang tulus, 4) Komitmen pada budaya kesejajaran hak dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.

3. Bagaimana Etika Global Diwujudkan?

Ada empat usulan mengenai bagaimana etika global diwujudkan pada zaman ini, yakni: usulan Peter Singer, Hazel Henderson, Allen Tough, dan Pierre Bourdieu.

3.1. Peter Singer: Komunitas Global

Sebenarnya apa yang dimaksud oleh Singer dengan etika global? “Pandangan etis yang mampu menyelamatkan dan memampukan kita semua untuk menjadi pemenang di era globalisasi yang tak tertahankan ini”²⁹⁰. Etika global lahir dari sebuah keyakinan bahwa dunia yang sedang

²⁸⁵ *Ibid*, hlm. 69-70.

²⁸⁶ *Ibid*, hlm. 70-71.

²⁸⁷ *Ibid*, hlm. 71-72.

²⁸⁸ *Ibid*, hlm. 16.

²⁸⁹ *Ibid*, hlm. 21-39.

²⁹⁰ Peter Singer, *Satu Bumi: Etika bagi Era Globalisasi*, Terj. Pranoto Iskandar, IMR Press, Cianjur, 2012 (Orig. Inggris, 2002)

menderita membutuhkan etika global. Banyak perubahan yang terjadi di dunia ini²⁹¹. Waktu berubah, tatanan masyarakat berubah dan sikap-sikap manusia pun ikut berubah, apalagi perubahan global. Perubahan global membawa dampak yang memaksa sikap-sikap manusia untuk berubah.

Peter Singer membahas secara kritis bagaimana empat masalah menantang harus ditangani secara etis. Masalah-masalah tersebut adalah perubahan iklim, peran *World Trade Organization*, apakah pelanggaran berat hak-hak asasi manusia membenarkan intervensi asing, dan bantuan asing. Perubahan-perubahan di atas menyebabkan penderitaan bagi manusia. Dua fakta yang paling menyakitkan dari penderitaan adalah kemiskinan dan kerusakan ekosistem dunia. Manusia sebagai spesies yang paling bertanggungjawab atas pelbagai kehancuran kolosal. Kesadaran etis yang meng-“global”. *Kesadaran* kita sebagai pemilik amanat untuk memelihara dan memanfaatkan bumi untuk dapat dimanfaatkan secara baik oleh generasi selanjutnya demi kebaikan semua, termasuk bagi makhluk non-manusia lainnya.

Peter Singer menandakan bahwa “kita, penghuni satu bumi, perlu memiliki tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi ini”²⁹². Suatu upaya internasional untuk membangun sebuah komunitas global. Kita membutuhkan penguatan pelbagai institusi global bagi keputusan global dan menjadikan mereka bertanggungjawab pada orang yang dikenai pengaruh olehnya. Singer menantang secara etis:

*“Kita tidak memiliki kuasa untuk melakukannya sendiri. Kita bisa mengambil berbagai langkah praktis untuk memperluas kepedulian kita melampaui batasan nasional melalui bermacam-macam organisasi yang bekerja untuk membantu mereka yang membutuhkan, di mana pun mereka berada”*²⁹³.

²⁹¹ Peter Singer membahas secara mendalam perubahan-perubahan yang signifikan harus ditangani secara etis, antara lain perubahan iklim, peran *World Trade Organization*, Hak-hak asasi manusia, dan bantuan asing.

²⁹² Peter Singer, *Op.Cit.*

²⁹³ *Ibid.*, hlm. 175. Bdk. Sebuah ucapan Paul Valery pada awal abad kedua puluh tak terbantahkan lagi, “tak ada lagi yang akan terjadi tanpa campur tangan seisi dunia” dalam François Chaubet, *Globalisasi Budaya*, Terj. Feybe I. Mokoginta, Jalasutra, Yogyakarta, 2015 (Orig. Prancis 2013), hlm. xi.

Namun kita perlu mengingat bahwa badan global memiliki kecenderungan menjadi tirani yang berbahaya atau birokrasi yang luar biasa besarnya.

Solusi etis yang diusulkan oleh Peter Singer adalah mengembangkan sebuah bentuk pemerintah yang tepat bagi sebuah bumi yang satu dan dunia yang lebih baik. Singer membangun laman <http://www.thelifeyoucansave.org> untuk menjangkau seluruh dunia. Misalnya, Surabaya dinilai sebagai kota yang *smart*.

3.2. Hazel Henderson: Perubahan Paradigma

Henderson mengusulkan “mengubah pandangan dunia” untuk mengatasi pandangan dunia yang diciptakan oleh kapitalisme global. Pandangan dunia yang dibangun berdasarkan logika diferensi, hasrat, dan percepatan yang tidak terkendali. Pandangan dunia yang memiliki kecenderungan persaingan, dominasi, dan akumulasi model kapitalisme terus berlanjut. Singkatnya, proses kapitalisme global memiliki arti yang sama dengan proses produksi “kehancuran global”.

Mengubah pandangan dunia menurut Hazel Henderson²⁹⁴ adalah mengubah paradigma kehidupan sosial itu sendiri. Masyarakat global tidak lagi menggantungkan masa depan mereka pada paradigma kapitalisme global, yang menggunakan indikator-indikator pertumbuhan (GNP/GDP) sebagai satu-satunya indikator kemajuan. Masyarakat global perlu menggunakan paradigma yang mengutamakan “kesejahteraan sosial” untuk membangun masa depan yang lebih manusiawi.

3.3. Allen Tough: Perubahan “Cara Berpikir”

Allen Tough²⁹⁵ menyatakan perubahan paradigma Hazel Henderson di atas tidak mencukupi, harus ada perubahan “cara berpikir” masyarakat global. Maksudnya, memahami keyakinan umum yang hidup di dalam masyarakat global, yang mengancam masa depan; memahami nilai-nilai individu dan tujuan individu; memahami *social*

²⁹⁴ Hazel Henderson, *Paradigms in Progress: Life Beyond Economics*, Knowledge System, 1991.

²⁹⁵ Allen Tough, “Developing Knowledge in Future Studies”, dalam Richard Slaughter (Ed.), *New Thinking for a New Millenium*, Routledge, 1996, hlm. 181.

will dan *political will*; memahami mengapa orang-orang bertindak tanduk seperti itu, dan bagaimana cara mengubahnya; memahami apa saja yang dapat mendorong perubahan sosial dengan tepat dan cepat, dan apa yang menghambatnya; memahami peran apa yang dimainkan oleh ide-ide besar, *images*, pandangan hidup, dan keyakinan budaya dalam perubahan; memahami cara mempengaruhi orang agar ia peduli terhadap generasi mendatang; memahami lembaga apa yang dapat menghasilkan tingkah laku individual atau kelompok yang peduli terhadap peradaban manusia dalam jangka panjang²⁹⁶.

Pendek kata, mengubah pandangan dunia berarti mengubah bagaimana masyarakat global kita mengubah persepsi mereka tentang makna dan tujuan hidup. Untuk itu, diperlukan pembelajaran, khususnya, pembelajaran mengenai bagaimana kita menjalani hidup secara kritis. Sikap kritis ditunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Apa yang berubah dalam hidup kita? Siapa yang mengonstruksi perubahan tersebut? Apa skenario perubahannya? Nilai-nilai apa yang kita peroleh dari perubahan? Nilai-nilai apa yang hilang?

3.4. Pierre Bourdieu: Gerakan Sosial Global

Bourdieu berharap kaum intelektual dapat membentuk suatu aliansi dengan melibatkan kelompok-kelompok lain, misalnya aktivis lingkungan hidup, aktivis gender, para pendukung kampanye perdagangan yang fair, para aktivis ekstrem kiri, serikat buruh dan seterusnya untuk menentang arus globalisasi yang menggerus etika.

Namun Bourdieu tidak bermaksud mengajak kaum intelektual untuk menjadi “intelektual publik” (sosiolog Todd Gitlin) yang memanfaatkan *medsos* dalam upaya mereka untuk mempengaruhi para pembuat keputusan dan bahkan publik. Ia lebih mengutamakan keterlibatan intelektual pada gerakan sosial, sebagaimana dikatakannya: “kaum intelektual seharusnya masuk ke tataran politik tanpa pretensi untuk menunjukkan kompetensinya sebagai peneliti”²⁹⁷.

²⁹⁶ Yasraf Amir Piliang (2004), *Op.Cit.*, hlm. 300-301.

²⁹⁷ Pierre Bourdieu, *Firing Back: Against the Tyranny of the Market*, Terj. Loic Wacquant, The New Press, New York, 2003, hlm. 18. Bourdieu tidak mempercayai para politisi yang dianggapnya telah “mengikuti arus” globalisasi. Di Prancis, misalnya, sejak akhir 1980-an

4. Refleksi

Harapan jernih akan kewarganegaraan universal kini menjadi suatu keniscayaan. Kewarganegaraan universal mencapai ujung kemanusiaan dari evolusi ideologi. Oleh karena itu, kita tidak dapat meninggalkan segera konflik peradaban yang diteorikan oleh Huntington.

Kita perlu memperkuat dasar etika untuk menyelamatkan planet dan kemanusiaan tempat kita tinggal melalui dialog, jika tidak dengan kesadaran pasif, sekurang-kurangnya dengan penyelesaian yang adil. Akhirnya, jika kita tidak mungkin mempertimbangkan beberapa peradaban secara nyata seperti peradaban universal sah, kita tidak mungkin juga menolak nilai-nilai universal yang dimiliki oleh segenap peradaban itu sah. Hal yang dilakukan oleh Huntington adalah suatu penyelidikan terhadap universalisme moral.

Apakah etika minimal Walzer dan etika mendunia Hans Küng merupakan bentuk moralitas universal? Kita dapat menjawab dengan sudut pandang Walzer bahwa menyoal etika yang “masuk akal dan universal” tidak memiliki “kecenderungan menguasai” atau menyerahkan kepada semacam “globalisasi”. Kemudian zaman pencerahan telah mencari bagaimana alternatif dari pluralisme budaya dari tradisi lain. Sebaliknya, hal yang sama mengizinkan untuk membuat ruang bagi semua tradisi dan bagi pandangan partikular mereka. Kita diminta untuk bersimpati dan tanpa perlu menerima semua artikulasi²⁹⁸.

Perspektif *a-posteriori* yang dipertahankan oleh Walzer, penyerahan/penolakan program dengan pendasaran umum tampak dapat menarik karena telah diberi panorama yang lemah dari filsafat aktual. Memang diperlukan penyelidikan nilai-nilai umum dari perspektif dasar yang ambil bagian dari pihak kentalnya budaya. Namun tugas filsafat bukan mereduksi hal itu. Seandainya masih ada sedikit kelaziman, mengapa menolak untuk penyelidikan kemasukakalannya? Mengapa dilarang untuk mendapat kembali dari “fenomena dasar”²⁹⁹?

pemerintahan Francois Mitterand telah jauh menyeleweng dari gagasan sosial-demokrat yang dicanangkannya. *Welfare state* (ciri negara sosial-demokrat) dihancurkan oleh pengurangan dan penghapusan pelbagai jaminan sosial.

²⁹⁸ Michael Walzer, *Geografia della Morale: Democrazia, Tradizioni e Universalismo*, Dedalo, Bari, 1999, hlm. 72.

²⁹⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Ensiklik Fides et Ratio* (14.9.1998), No. 83.

Küng menyatakan kepada suatu kemungkinan pendasaran apabila menunjuk pada kebutuhan praktis yang sangat penting. Dari pandangan norma-norma yang akan disempurnakan dan oleh karena itu diperkenankan, tetapi diskursus berfaedah untuk pendalaman yang dijelaskan secara panjang lebar. Ia mendukung bahwa masyarakat dewasa ini harus melawan sekuat tenaga hal-hal yang memisahkan seperti fundamentalisme religius dan moralisme, tetapi juga “pluralisme fakultatif postmodern, atau hedonisme yang “diadabkan” atau “etika nihilis’ biasa mengambil dari bagian dalam/isi³⁰⁰. Alasan penekanannya adalah masyarakat tidak akan dapat dimiliki bersama-sama dari internet, dari pasar global, dari modernisasi ekonomi dan sosial, tetapi:

“mulai dari etika yang dapat mengikat dan mewajibkan dengan konsensus di dasar suatu niat akan nilai-nilai, kriteria-kriteria dan perilaku umum, yang memiliki otonomi otomatis mewujudkan dan tanggungjawab untuk solider. Etika bagi iman para orang-orang yang percaya berakar pada sebuah realitas paling pertama dan paling akhir, karena ia dapat ambil bagian dengan motivasi manusiawi dan dari para orang-orang yang tidak percaya, oleh sebab itu di tingkat penyatuan kelompok-kelompok sosial, partai-partai politik, negara-negara dan agama-agama dengan semua perbedaan”³⁰¹.

Selanjutnya, menurut Aldo Vendemiati, permufakatan bersama universal didesak oleh penekanan pada prinsip-prinsip dan norma-norma tersebut di atas. Di pihak lain, argumentasi a-posteriori yang berdasar pada permufakatan bersama adalah cukup untuk menekankan bahwa, a-posteriori, permufakatan bersama semacam itu harus ada. Masalah dasar yang selalu ada: mengapa ada moralitas? Mengapa menggarisbawahi pada panduan dari prinsip-prinsip dan norma-norma etis lebih baik daripada mengikuti hasrat egois³⁰²? Ratzinger telah menengarai hal ini:

“Suatu etika minimal demikian dicampur dari macam-macam agama yang sesungguhnya kekurangan karakter yang dapat mewajibkan, yakni otoritas intern, maka ethos diperlukan. Kekurangan lain adalah

³⁰⁰ Bdk. H. Küng, *Etica mondiale per la politica e l'economia*, Queriniana, Brescia, 2002, hlm. 239f.

³⁰¹ H. Küng, *Etica mondiale per la politica e l'economia*, Queriniana, Brescia, 2002, hlm. 246f.

³⁰² Bdk. J. Van Ingen, *Why be Moral? The Egoistic Challenge*, Lang, New York & Bern-Frankfurt a. M., 1994.

*pernyataan rasional yang mencukupi, bahwa pendapat para ahli dapat dan harus mendukung otoritas; kekurangan lain lagi adalah perwujudan itu sendiri yang cenderung pada ethos yang mujarab*³⁰³.

Sekalipun demikian etika perlu mendengarkan tradisi-tradisi besar religius. Etika perlu menetapkan/menyusun horison tafsiran universal yang mampu menunjukkan makna paling akhir dari kehidupan dan kematian. Etika menjadi efektif. Nilai-nilai, norma-norma dan motivasi-motivasi menghasilkan jaminan yang tak bersyarat, yang dapat diwujudkannyatakan, akhirnya mereka mampu menciptakan keamanan spiritual, kepercayaan, dan harapan. Sebaliknya, sekularisasi memotong tali pusat antara tradisi iman yang besar dan pencarian yang masuk akal, atau fundamentalisme menyingkirkan kemungkinan untuk menyelidiki dengan rasio itu sendiri. Fundamentalisme bermuara dalam konflik dan terorisme apabila tidak mengarah ke pengasingan dan sifat tidak dapat diberitahukan. Sekularisme radikal cenderung menyokong kebenaran dengan mufakat bersama (*il consenso*), dan “seberapa mudah getas merupakan mufakat bersama dan seberapa cepat, dalam iklim intelektual yang pasti, kelompok-kelompok partai dapat memasukkan persatuan-persatuan yang mewakili otoritas kemajuan dan tanggungjawab di hadapan kami semua”³⁰⁴.

Akhir kata, substansi kebenaran dengan mufakat bersama dan penyerahan pada setiap usaha untuk mengatasi sudut pandang partikular tampaknya didominasi oleh tempat-tempat peradaban Barat. Paradoks budaya peradaban semacam ini ditafsirkan dalam dirinya sendiri sebagai puncak evolusi historis dan pura-pura memasukkan “globalisasi” sebagai model yang cocok. Oleh karena itu, kita perlu mendalami dalam tebalnya relativisme barat kontemporer.

Globalisasi memiliki kecenderungan untuk menggariskan etika global. Etika global adalah rincian etis yang menyeluruh memberi rambu-rambu moral bagi siapa pun, negara mana pun. Wujud nyata etika global adalah komunitas global, perubahan paradigma, perubahan cara berpikir, gerakan sosial global.

³⁰³ J. Ratzinger, *La via della fede: Saggi sull'etica cristiana nell'epoca presente* (1996), Ares, Milano, 2005, 30.

³⁰⁴ J. Ratzinger, *La via della fede: Saggi sull'etica cristiana nell'epoca presente* (1996), Ares, Milano, 2005, 31.

Daftar Pustaka

a. Buku-Buku

- Alexy, Robert, *Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1994.
- Bourdieu, Pierre, *Firing Back: Against the Tyranny of the Market*, Terj. Loic Wacquant, The New Press, New York, 2003.
- Chaubet, François, *Globalisasi Budaya*, Terj. Feybe I. Mokoginta, Jalasutra, Yogyakarta, 2015 (Orig. Prancis 2013).
- Featherstone, Mike (Ed.), *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*, Sage Publications India pvt Ltd, New Delhi, 1991
- Fukuyama, Francis, *The End of History and the Last Man*, Penguin Books, 1992.
- Henderson, Hazel, *Paradigms in Progress: Life Beyond Economics*, Knowledge System, 1991
- Hooker, Brad & Little, Margaret (Eds.), *Moral Particularism*, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- Huntington, S.P., *Lo scontro della civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Garzanti, Milano, 1997 (Orig. Inggris 1996).
- Ingen, J. Van, *Why be Moral? The Egoistic Challenge*, Lang, New York & Bern-Frankfurt a.M., 1994
- KOMPAS, *Indonesia Abad XXI: Di Tengah Kepungan Perubahan Global*, Penerbit Harian KOMPAS, 2000.
- Küng, Hans, *A Global Ethics for Global Politics and Economics*, SCM Press, London, 1997
- Küng, Hans, *Etica mondiale per la politica e l'economia*, Queriniana, Brescia, 2002
- Küng, Hans & Kuschel, Karl-Josef, *Etik Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999 (Orig. Inggris).
- Naisbitt, John, *Global Paradox*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994.
- Newland, Kathleen & Soedjatmoko, Kemala Candrakirana (Penyunting), *Menjelajah Cakrawala: Kumpulan Karya Visioner Soedjatmoko*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

- Piliang, Yasraf Amir, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Jalasutra, Yogyakarta & Bandung, 2004.
- Postman, Neil, *Technopoly: The Surrender of Culture to Technology*, Vintage Books, 1993.
- Rachels, James, *Filsafat Moral*, Terj. A. Sudiarja, Kanisius Yogyakarta, 2004 (Orig. Inggris, 2003).
- Ratzinger, J., *La via della fede: Saggi sull'etica cristiana nell'epoca presente* (1996), Ares, Milano, 2005.
- Ritzer, G., *The McDonaldization of Society*, Pine Forge Press, Thousand Oaks, California, 2008.
- Singer, Peter, *Satu Bumi: Etika bagi Era Globalisasi*, Terj. Pranoto Iskandar, IMR Press, Cianjur, 2012 (Orig. Inggris, 2002).
- Vendemiati, Aldo, *Universalismo e Relativismo nell'Etica Contemporanea*, Marietti, Genova-Milano, 2007.
- Walzer, Michael, *Geografia della morale: Democrazia, tradizioni e universalismo*, Dedalo, Bari, 1999
- Winarno, Budi, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, CAPS, Yogyakarta, 2014.
- Wolf, Martin, *Globalisasi: Jalan menuju Kesejahteraan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

b. Artikel-Artikel

- Franck, T.M., "I diritti umani sono universali?", dalam *Fondazione liberal*, 10 (2002): 91-97.
- Skelton, Tracey, "Globalization, Culture, and Land: Carribean", dalam Eleonore Kofman & Gillian Youngs, *Globalization: Theory and Practise*
- Tough, Allen, "Developing Knowledge in Future Studies", dalam Richard Slaughter (Ed.), *New Thinking for a New Millenium*, Routledge, 1996

c. Kamus & Ensiklik

- Fransiskus, *Encyclical Letter Laudato Si': On Care for Our Common Home*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 24 Mei 2015.

Ritzer, George, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012 (Orig. Inggris, 2011).

Yohanes Paulus II, *Fides et Ratio (Iman dan Akal Budi)*, Terj. R. Hardawiryana, DOKPEN KWI, Jakarta, 1999.